

Gerakan Ultranasionalis pada Masa Transisi Demokrasi di Federasi Rusia Tahun 1990-an

ZEFFRY ALKATIRI

Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia

Abstract

This article will discuss the ultranationalist movement in Russia, emerged and flourished in the early until in the middle of 1990s in Russian Federation state. This ultranationalist movement emerged sporadically at the same time with the emerge of other movement groups at the time of democracy transition period. The openness condition had pushed elements of society established political groups and parties. Most of them supported government programs, while the other put a role as opposition groups. The ultranationalist movement, united in Democrat-Liberal Party, was the hard-liner groups, who opposed Russian government policy. However, in the middle of 1990s, this movement was becoming weak. The emerge and weakened of this movement was caused by some factors which will be discussed in the article below.

Keywords: democracy transition, opposition, ultranationalist

Pada masa transisi demokrasi di Rusia tahun 1990-an terjadi interaksi keberagaman antarelit. Pada masa itu bermunculan kelompok elit politik, seperti garis keras-konservatif, ultranasionalis, reformis, radikal, dan golongan moderat. Di satu sisi, partai *Yabloko* yang dipimpin oleh Grigory Yavlinsky bersama partai *Russia Choice* (Yegor Gaidar, Anatoly Chubais, dan Boris Nemtsov) menjadi koalisi partai Liberal. Mereka

mendapatkan dukungan dari masyarakat urban kelas menengah yang bermukim di beberapa kota besar. Sementara, kelompok massa mengambang yang dikepalai oleh Gubernur Moskow Mayor Jenderal Yuri Luzhkov dan Gubernur Krasnoyarsk, Mayor Jenderal Alexander Lebed, menjadi kelompok koalisi yang terbuka untuk ditarik ke kanan atau ke kiri. Di sisi lain, terdapat partai Liberal Demokrat yang berhaluan

ultranasionalis, pimpinan Vladimir Zhirinovskiy yang bersama Partai Komunis Federasi Rusia, bekerja sama menekan pemerintahan Yeltsin. Mereka secara konfrontatif dan frontal menolak kebijakan Yeltsin. Kebanyakan anggota kelompok garis keras ini menduduki kursi parlemen sebelum referendum. Kondisi tersebut memperlihatkan keragaman kelompok politik internal dalam tubuh pemerintah maupun dalam masyarakat Rusia, yang merupakan peninggalan konflik lama sejak masa pemerintahan Gorbachev (1985-1991).

Selain mereka, ada kelompok *Demokratiya Derzhavniki* yang juga beroposisi atas kebijakan Yeltsin. Kelompok ini secara terbuka mengkritik lewat media massa kebijakan politik luar negeri yang membuat Rusia terlalu dekat dengan AS. Mereka menghendaki agar politik luar negeri Rusia difokuskan pada wilayah Asia Tengah dan negara CIS, sebagai bagian dari keberadaan dalam negeri Rusia.¹

Selain itu, di dalam tubuh pemerintahan Boris Yeltsin masih terdapat dua kubu yang saling berseberangan. Pertama, adalah kubu *Eurosianis* yang berpandangan, nasionalis, bahwa Rusia dapat menjadi

perantara antara Eropa dan Asia. Kedua, adalah kubu *Europeanis* yang mendorong agar Rusia masuk dalam peradaban keluarga Eropa Barat.²

Bantuan Negara Donor

Melihat fenomena konflik itu, pihak Barat merasa khawatir dan memberikan bantuan sebesar \$ 24 triliun yang dikenal sebagai *Paket Bush* 1992, yang bertujuan untuk membantu kelangsungan stabilitas pemerintahan yang berorientasi demokrasi dan liberal. Sebelumnya, atas persetujuan negara-negara G7, lewat IMF memberi bantuan untuk Rusia sebesar \$ 15.6 triliun sejak tahun 1992. Mereka sadar, bantuan tersebut tidak sepenuhnya ditujukan untuk perbaikan ekonomi, tetapi untuk menstabilkan politik dan mendukung kepemimpinan Boris Yeltsin. Mereka (negara OSCE, AS, IMF dan beberapa korporat) khawatir jika persenjataan militer bekas Uni Soviet jatuh ke tangan pihak konservatif dan ultranasionalis. Atas alasan itulah, negara-negara G7 bersepakat membantu Yeltsin agar dapat bertahan menghadapi lawan-lawannya.³

² Angela E. Stein. "Russia: Farewell to Empire?", *World Policy Journal*, Fall. Vol XIX, No 3. 2002, hlm. 83.

³ Michael McFaul. "Getting Russian Right", *Foreign Policy*. Winter. No 117, 2000, hlm. 65, dan "Russian Democracy: Still Not a Lost Cause", *The Washington Quarterly*. Winter. Vol 23. No 1. 2000.

¹ Surat Kabar *Segodnya*, dalam Omri Archive Article, 21 Juni 1992, <http://archive.tol.cz/omri/restricted/article.php?id=9000-9120>.

Dari tahun 1992-1998 AS telah memberi bantuan sebesar \$ 5.45 triliun, \$ 15.6 triliun dari IMF, dan \$ 6 triliun lewat Bank Dunia. Di sisi lain AS juga membantu mengirimkan konsultan dan asisten ahli untuk membuat rancangan konstitusi serta mengawasi tahapan bantuan program privatisasi dan *shock therapy*, termasuk dalam bidang pengawasan senjata nuklir dan program kemanusiaan lainnya. AS pun menambahkan bantuannya sebesar \$ 130 milyar dari total \$ 5.45 triliun yang digunakan untuk program penanggulangan kriminalitas, pelaksanaan hukum, HAM, dan program demokratisasi.⁴

Bantuan USAID (AS) pada masa transisi demokrasi sangat besar, khususnya dalam mengembangkan ekonomi pasar bebas. Aspek ini menjadi prioritas perhatian pihak AS, sebab di dalamnya terdapat kepentingan investasi AS di Rusia. Melalui program bantuan USAID, AS mencoba menstabilkan sistem politik dan ekonomi Rusia. Walaupun telah banyak bantuan diberikan, tetapi tetap saja terjadi krisis ekonomi yang mengganggu kedudukan Yeltsin pada tahun 1998.

⁴ McFaul, *Op cit.*, hlm. 61, 66-67 dan Daniel Triesman. "After Yeltsin Come Yeltsin", *Foreign Policy*. Winter, No 117, 2000. dan "Triesman " Blaming Russia First: Review Essay: Three Books Examine Russia's Woes", *Foreign Affair*. November/December, 2000: 146.

Konflik Antarelit Politik

Dua tahun pertama kekuasaan Boris Yeltsin (1992-1994) diwarnai perselisihan dengan pihak parlemen Rusia. Presiden menawarkan rencana agar parlemen membubarkan diri dan mengadakan Pemilu untuk membentuk parlemen baru. Presiden melihat bahwa para anggota parlemen merupakan orang-orang lama warisan Uni Soviet yang tidak menghendaki perubahan dan reformasi. Rencana Presiden ditolak dan mereka tetap berpegang pada konstitusi Uni Soviet 1977 yang sudah kadaluwarsa dan sudah diamandemen.

Pada bulan Desember 1992, Boris Yeltsin mengganti kedudukan Perdana Menteri Yegor Gaidar dengan Victor Chernomyrdin (Presiden Komisaris *Gazprom*) yang berhasil meloloskan program kerjanya di parlemen (April 1993) dan mengangkat Wakil Presiden Jendral Alexander Rutskoi dari kalangan konservatif, agar kubu mereka dapat dijembatani. Yeltsin juga mengadakan rekonsiliasi dengan pihak militer dengan mengangkat Jenderal Albert Makashov yang berperan dalam menggagalkan kudeta 1991, sebagai Panglima Angkatan Perang. Tahun 1992 juga dilakukan program *shock therapy* dengan meniru model transformasi ekonomi kapitalis. Akan tetapi program ini tidak berjalan mulus. Sebagai konsekuensinya

Yeltsin akhirnya memperlambat langkah perubahan dengan jalan memilih model gradualisme.

Sejak Desember 1991 Jeffrey Sachs, penasehat ekonomi dari Amerika Serikat, mendesak Boris Yeltsin untuk melaksanakan *shock therapy* yang bertujuan menstabilkan ekonomi Rusia. IMF juga telah mengajukan kepada negara-negara G7 bahwa Moskow dapat dijadikan mitra yang baik dan menganjurkan reformasi ekonomi Rusia melalui model *shock therapy*. Awal tahun 1992 setelah diadakan pengetatan harga, pihak oposisi mendesak Yeltsin untuk menghentikan kebijakannya tersebut. Bahkan menjelang referendum tahun 1993 pihak oposisi bertambah gencar menolak campur tangan IMF di Rusia. Dengan demikian jelas bahwa model *shock therapy* gagal dilakukan karena tidak dapat membentuk pasar yang sebenarnya dan dianggap banyak merugikan pihak oposisi yang mewakili kalangan *status quo*. Akibatnya terjadi hiperinflasi yang mengguncangkan sistem perekonomian Rusia selama tahun 1992-1993. Kondisi tersebut telah memicu pihak oposisi untuk mendesak Boris untuk turun dari kursi kepresidenan. Kondisi ketidakstabilan itu telah mendorong gerakan ultranasionalis pimpinan Vladimir Zhirnovsky bersuara menekan dan mengkritik kebijakan Yeltsin. Pihak konservatif

merasa kecewa terhadap perhatian Barat kepada Rusia yang tidak memulihkan kondisi, dan dianggap menambah kemelut yang ada.

Sampai pertengahan tahun 1993 kekuasaan di masyarakat kembali ke tangan penguasa lama. Mereka itulah yang menguasai bangku parlemen dengan memanfaatkan beberapa partai populis. Bahkan beberapa propinsi di luar Moskow menolak langkah demokrasi yang dilakukan pemerintah di Moskow. Sebelumnya, dalam rangka resentralisasi dan merebut sumber daya bekas Uni Soviet, Presiden mengangkat kepala administrasi di tiap wilayah dan propinsi. Tetapi mereka harus berhadapan dengan badan perwakilan Uni Soviet yang masih bertahan, sehingga menimbulkan konflik lokal yang menjalar sampai ke pusat. Kondisi itu berlangsung sampai disahkannya konstitusi baru lewat Referendum tahun 1993.

Pada masa transisi itu, terbentuk 3 (tiga) kelompok politik, yaitu: pertama, kelompok radikal reformis, yang mempelopori pasar bebas, *shock therapy* dan privatisasi. Gagasan kelompok ini dipromosikan oleh Andrei Kozyrev yang mempunyai hubungan baik dengan pihak Barat dan IMF. Kelompok ini berasal dari golongan akademik, seperti Yegor Gaidar dan Gregori Yavlinsky sebagai ekonom. Dari kelompok ini muncul

gerakan Rusia untuk reformasi demokrasi 1991. Di Moskow gerakan dipimpin oleh Mayor Gavriil Popov, sementara di St Peterburg dipimpin oleh Mayor Anatolii Sobchak yang mendukung kedudukan Yeltsin. Tetapi munculnya faksi di dalam tubuh kelompok tersebut menyebabkan kurang efektifnya gerakan mereka, walaupun pada awalnya berhasil mendominasi politik Rusia.

Kedua, kelompok konservatif-nasionalis yang merupakan kelompok oposisi terhadap program Yeltsin. Pada dasarnya kelompok ini sangat berkomitmen terhadap nasionalisme Rusia dan anti-Barat. Mereka ingin mengembalikan suatu ekonomi terencana dan terpusat. Kelompok ini bersifat *chauvinis* dan mencurigai adanya konspirasi di balik reformasi ekonomi yang dijalankan oleh Yeltsin. Kelompok ini terbagi dalam beberapa faksi, seperti Front Penyelamat Rusia dan Front Rakyat Rusia Bersatu. Di antara tokohnya adalah Ruslan Khasbulatov (Ketua Parlemen) dan Alexander Rutskoi (Wakil Presiden). Sebelumnya, mereka termasuk kelompok tengah yang berubah orientasinya karena didukung pihak konservatif komunis. Keduanya kemudian menjadi musuh Yeltsin dalam peristiwa perebutan gedung parlemen (Oktober 1993). Tokoh konservatif nasionalis lainnya adalah Vladimir Zhirinovskiy, ketua partai Liberal Demokrat yang

lebih radikal dari kedua tokoh sebelumnya. Oleh pihak Barat Zhirinovskiy dianggap sebagai tokoh fasis *chauvinis* yang berbahaya. Dia sendiri sulit bekerja sama dengan anggota kelompok konservatif, karena dianggap terlalu keras dan merugikan kelompok mereka. Meski, demikian, mereka cepat mendapatkan kursi di parlemen dalam Pemilu Desember 1993.

Ketiga, Kelompok Tengah atau kelompok kompromis yang cenderung mendukung program demokratisasi. Akan tetapi mereka sangat berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya. Pernyataan kelompok ini bersifat oportunistis. Sebagian kelompok tengah kiri yang sebelumnya menguasai aset negara jelas menjadi terpojok dengan kedua kebijakan ekonomi baru itu dan menyebabkan mereka mengambil peran sebagai oposisi. Sedangkan kelompok tengah kanan, adalah pihak yang sebelumnya konservatif-nasionalis, akan tetapi dapat digunakan oleh Yeltsin untuk mendukung programnya, seperti Victor Chernomyrdin, Yegor Gaidar, Yuri Petrov, dan Sergei Shakarai. Tokoh tengah kanan, seperti Arkhadi Voslky, Yuri Shokov, Valeri Zorkkin akhirnya berpaling ke kiri, karena merasa tidak sejalan dengan kebijakan politik Yeltsin yang tidak menguntungkan mereka.

TABEL 1
PETA KEKUATAN DAN SEBARAN PERPOLITIKAN DI RUSIA, 1991-1994

KELOMPOK RADIKAL REFORMASI	KELOMPOK TENGAH KANAN	KELOMPOK TENGAH	KELOMPOK TENGAH KIRI	KELOMPOK KONSERVATIF DAN ULTRANASIONALIS
Yegor Gaïdar	V. Chernomyrdin	Oleg Lobov	Y. Shokov	R. Khasbulatov
V. Shumeiko	Yuri Petrov	A. Volsky	N. Travkin	A. Rutskoi
Boris Yeltsin	S. Shkarai	Yuri Yarov	V. Zorkin	G. Zyuganov
Boris Federov	G. Yavlinsky	G. Khizha	Ivan. Rybkin	V. Zhirinovskiy

Sumber: White (ed), *Development in Russian and Post-Soviet Politics*, 1994: 35-36 dan 102

Yeltsin sendiri bebas partai dan tidak memiliki partai. Yeltsin berperan seperti agen yang menjembatani antara kelompok radikal reformis dengan pihak konservatif-nasionalis, antara Rusia dan Barat, antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi Yeltsin tidak dapat mengajak wakilnya, Alexander Rotskoi untuk mengikuti programnya, bahkan Rutskoi mengkritik program kebijakan Yeltsin sebab Rutskoi mempunyai hubungan dengan pihak industri militer yang terganggu dengan kebijakan Yeltsin. Selama bulan Februari sampai April 1993, Yeltsin memerintahkan Rutskoi menangani reformasi agraria, tetapi Rutskoi malah memasukkan orang-orang komunis lama dan melakukan strategi lama yang bertentangan dengan program reformasi agraria

yang diinginkan Yeltsin. Bahkan ketika sudah merasa kuat, Rutskoi ikut mencalonkan diri dalam Pemilu 1993.

Atas dasar itu pada konstitusi yang baru, Yeltsin mengurangi tugas dan kedudukan Wakil Presiden, bahkan kemudian menghilangkannya. Kedudukan tersebut sudah tergantikan dengan ditunjuknya Perdana Menteri yang mempunyai tugas dan peran serupa dengan Wakil Presiden. Perjalanan Rutskoi ditentukan setelah gedung parlemen direbut. Rutskoi yang bergabung dengan gerakan oposisi yang diketuai oleh Ruslan Khasbulatov (sebagai Ketua Parlemen) akhirnya ditangkap pada bulan Oktober 1993. Sebagai penggantinya Yeltsin menggantikan kedudukan Wakil Presiden dengan Perdana Menteri Yegor Gaidar yang

8 bulan kemudian juga digantikan oleh Victor Chernomyrdin. Alasan penggantian tersebut karena Chernomyrdin dianggap dapat menjembatani kepentingan kelompok konservatif yang berada di parlemen yang baru dengan pihak eksekutif.⁵

Reformasi ekonomi dari Yegor Gaidar gagal dan ekonomi Rusia akhir tahun 1993 dan menjelang 1994 tidak menentu. Orang yang merasa senang dengan kondisi itu adalah Vladimir Zhirinovskiy, tokoh ultranasionalis yang berkampanye lewat media massa mengemukakan kebijakan ekonomi Yeltsin dan mengemukakan gagasan multikulturalisme di wilayah Federasi Rusia. Kampanye Zhirinovskiy mendapat sambutan di beberapa wilayah perbatasan Rusia.

Juni 1993, Yeltsin membentuk Komisi Konstitusi untuk menyusun rancangan konstitusi baru. Sementara pihak parlemen juga membuat hal yang sama. Berbeda dengan yang dibuat oleh pihak parlemen, konstitusi yang diajukan Yeltsin menggabungkan sistem Presidensial dan Parlementer dengan Presiden sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Pasal ini menjadi ajang konflik antara Presiden dengan para anggota parlemen yang masing-masing berusaha mengedepankan kepentingannya. Dalam pada itu, tarik

ulur kepentingan antara Presiden dan Parlemen terus berlangsung. Salah satu penyebabnya adalah adanya beberapa pasal dalam rancangan konstitusi yang lebih menitikberatkan pada kekuasaan Presiden. Karena tidak ada kompromi, pada tanggal 21 September 1993 Yeltsin mengeluarkan Dekrit No. 1400 yang diambil dari amandemen konstitusi 1977 yang isinya membubarkan parlemen.

Sebaliknya Parlemen menolak dan ganti memecat Presiden. Konflik itu akhirnya diselesaikan dengan penyerbuan ke gedung parlemen oleh Presiden pada tanggal 3-4 Oktober 1993. Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 12 Desember 1993 diadakan Pemilu Rusia dan referendum untuk mengesahkan konstitusi baru yang demokratis. Referendum menghasilkan 58,43% suara masyarakat pro konstitusi baru dan akhirnya konstitusi baru dapat disahkan.

Konstitusi tersebut dikenal dengan nama populer konstitusi Yeltsin yang merupakan konstitusi demokrasi pertama yang mencakup pengaturan tentang HAM bagi warga negara, masyarakat minoritas, dan pekerja media massa. Dengan adanya konstitusi baru itu, maka Rusia memasuki tahapan baru dalam kejelasan hukum yang dulu tidak dipedulikan. Konstitusi baru ini juga tidak terlepas dari kritik, karena lebih memberikan porsi dominan kepada pihak Presiden.

⁵ Willerton dalam White, *Op.cit.*, hlm. 50.

Perang terbuka kedua kekuatan tersebut juga melibatkan media massa yang masing-masing mendukung kepentingan mereka: (1) media yang pro presiden dan pemerintahan Yeltsin adalah *Kommersant*, *Moskovskii Komsomolet*, *Izvestiya*, *Rossiiskii Vesti*, *Itar* (stasiun televisi) dan TASS (kantor berita); (2) media yang mendukung kelompok konservatif parlemen, adalah *Pravda*, *Sovetskaya Rossiya*, *Rossiiskaya Gazeta*; (3) sementara itu, media kelompok tengah adalah *Interfax* dan *Pasfaktum* (keduanya kantor berita), koran *Nezavisimaya Gazeta*, *Segodnya*, *Moscow News* atau *Moskovskie Novosti*.⁶

Dekret No. 1400 juga berisi pengambilalihan media *Rossiskaya Gazeta*, pembekuan untuk sementara stasiun televisi dan beberapa media oposisi seperti *Dla*, *Sovetskaya Rossiya*, *Nezavisimaya Gazeta*, dan *Segodnya*. Tetapi setelah konflik mereda pada bulan Desember, media tersebut diizinkan terbit kembali dengan penggantian sejumlah anggota dewan redaksi yang berasal dari kubu Yeltsin.

Kedua peristiwa tersebut merupakan penentuan bagi AS untuk meneruskan bantuannya atau tidak

sebab AS khawatir terhadap tindakan Zhirinovskiy dari partai Liberal Demokrat yang radikal yang mengangkat isu fasis-chauvinis. Padahal pada masa itu AS sedang terus mengamati perkembangan *shock therapy* yang dijalankan oleh Yegor Gaidar.

Setelah parlemen bubar, Yeltsin mengadakan Pemilu pada bulan Desember 1993 yang diikuti oleh 13 partai politik. Ketiga belas partai yang ikut Pemilu 1993 bersaing dalam kampanye maupun dalam gagasan. Mereka terbagi dalam dua blok besar yakni, (1) Blok yang mengarah pada pihak Barat, (2) Blok yang mempertahankan legitimasi nasionalisme kerusiaan.⁷

Genadi Zyuganov berhasil dalam Pemilu Desember 1993 sebagai anggota parlemen, setelah partainya (Partai Komunis Rusia) mengombinasikan gerakan nasionalis dengan komitmen dan reformasi baru menuju tatanan demokrasi. Model akomodasi seperti itu juga dilakukan oleh Sergei Baburin dan Nikolai Popov, ketua Partai Persatuan Masyarakat se-Rusia (*Rossiiskii Obschenarodnyi Soyuz, ROS*). Tindakan yang sama juga dilakukan

⁶ Sharlet dalam White, *Op.cit.*, hlm. 124-125, lihat juga *Post-Soviet Media Law & Policy Newsletter 1993 – 2000, Moscow Media Law and Policy Center*. <http://www.vii/monroe>.

⁷ Sumber: *Russian Political Landscape 1991 – 1996, Political Dynamics in Russia 1991 – 1996, and GNP Russian Federation*, http://www.nupi.no/russland/elec/russian_political_landscape_1991.htm, Cox, *Op.cit.*, hlm. 32.

TABEL 2
PETA KEKUATAN PARTAI DI RUSIA 1991—1994

KELOMPOK RADIKAL REFORMASI	KELOMPOK TENGAH KANAN	KELOMPOK TENGAH	KELOMPOK TENGAH KIRI	KELOMPOK KONSERVATIF DAN ULTRANASIONALIS
<ul style="list-style-type: none"> • Gerakan Demokrasi Rusia • Gerakan Demokrasi Reformasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Sosial Demokrasi • Partai Republik • Partai Demokrasi Konstitusi • Partai Patriot • Partai Petani • Persatuan Demokrasi Kristen 	<ul style="list-style-type: none"> • Persatuan Kaum Tengah • Partai Kebebasan Rusia • Partai Demokrasi Rusia • Partai Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Republik Rusia • Persatuan Rakyat Rusia • Front Penyelamat Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Liberal Demokrat • Partai Komunis Federasi Rusia • Persatuan Komunis • Partai Buruh • Partai Pekerja Sosialis • Partai Komunis Rusia • Partai Persatuan Komunis Bolshevik

Sumber: White (ed). *Development in Russian and Post-Soviet Politics 1994*: 35-36 dan 102.

oleh gerakan Kristen Demokrat Rusia dan Persatuan Renaissance Rusia yang diketuai oleh Dmitri Rogozin (*Soyuz Vezrohdheiy Rossii*)⁸

Krisis Multi Dimensi dan Gerakan Ultranasionalis

Masalah Rusia semakin kompleks dibanding dengan negara Eropa Timur lain sebab di wilayahnya bermukim berbagai masyarakat yang berbeda secara etnis dan agama. Kebangsaan yang dulu disatukan dalam Uni Soviet, sekarang sebagian berpisah dan sebagian dari mereka

ikut bergabung bersama dalam Federasi Rusia dan CIS. Bersamaan dengan itu muncul gerakan etno-nasionalis yang ada di sebagian negara Eropa Timur. Gerakan itu ikut memberikan pengaruh kepada gerakan serupa di beberapa negara bekas Uni Soviet, khususnya di kawasan negara Federasi Rusia, seperti Chechna, Ingustia, dan Dagestan. Hal ini secara tidak langsung telah juga mendorong kebangkitan nasionalisme baru yang radikal di Rusia, khususnya ditujukan kepada bangsa-bangsa yang ingin memerdekakan diri dari wilayah Federasi Rusia. Kebangkitan nasionalisme itu

⁸ Sakwa dalam White, *Op cit.*, hlm. 299.

diwadahi oleh gerakan ultranasionalis dari partai Liberal Demokratik yang berciri fasis. Akibatnya sering terjadi tindakan kekerasan dari kelompok tersebut terhadap masyarakat non-Rusia.

Pada Pemilu Parleментар tahun 1993 pengamat Amerika dan Rusia mengkhawatirkan terhentinya program privatisasi sebab ternyata pihak pro-reformasi seperti partai *Russia Choice* yang mendukung program tersebut hanya mendapat 15 % suara. Sementara partai Liberal Demokrat pimpinan Vladimir Zhirinovskiy yang beraliran ultranasionalis yang menolak program itu mendapat 35% suara.⁹

Kebijakan ekonomi dari Perdana Menteri Yegor Gaidar, bersama penasihatnya Anatoly Chubais yang merancang program *shock therapy* dan liberalisasi ekonomi selalu mendapat kritik dan serangan kubu konservatif. Kondisi ini juga yang menghambat pemulihan ekonomi Rusia. Dampaknya memperlemah kedudukan Yeltsin di mata masyarakatnya. Meski Yeltsin masih didukung oleh Partai Reformasi Rusia, tetapi oleh lawan politiknya dianggap belum banyak mengadakan perubahan yang berarti. Memasuki tahun 1993-1995 semua partai oposisi bersikeras dalam memutuskan kebijakan model ekonomi yang ditawarkan Boris Yeltsin.

⁹ McFaul, *Op cit.*, hlm. 87.

Pihak radikal reformasi, termasuk Yegor Gaidar menolak masuknya bantuan asing ke Rusia. Dalam kondisi demikian, partai moderat terpecah dua. Pihak pertama yang mendukung perlunya bantuan asing dan pihak kedua yang menolak bantuan asing. Fenomena itu juga terlihat pada kursi perolehan dalam Pemilu Parleментар. Pihak reformis mendapatkan 34%, sedangkan pihak garis keras mendapatkan 43%. Perolehan angka itu menguatirkan pihak Barat. Apalagi terlihat kecenderungan kampanye Zhirinovskiy ke arah fasis dan diskriminatif.

Vladimir Zhirinovskiy dengan partainya Liberal Demokrat (LDP) dari kubu ultranasionalis berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Parleментар Pertama pada tahun 1994. Kondisi itu menguatirkan banyak kalangan, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat sebab pada saat yang sama mereka sedang mendorong perbaikan kondisi demokrasi dan HAM di Rusia. Kemenangan itu boleh jadi disebabkan oleh (1) keberhasilan kampanyenya yang menawarkan kembali kekuatan kebangsaan dan nasionalisme Rusia, (2) kondisi krisis multidimensi dalam masa transisi yang menyebabkan masyarakat Rusia lebih terdorong untuk kembali pada era sebelumnya dan membuka peluang untuk berkembangnya kelompok ultranasionalis, (3)

bantuan dari AS dan Eropa yang belum merata dan belum dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, sehingga belum dapat menstabilkan kondisi ekonomi yang akibatnya menimbulkan kerawanan sosial.

Fenomena itu telah menguatirkan Presiden AS Bill Clinton dan ia mendesak agar IMF segera membantu Rusia sebelum terlambat dan jatuh ke tangan kelompok fasis. Selama tahun 1994 muncul kekhawatiran pihak Barat dengan adanya gerakan ultranasionalis yang terang-terangan memproklamirkan organisasinya yang mirip Fasis-Nazi. Mereka ingin mengembalikan kekuasaan pada satu tangan. Pada masa itu bermunculan organisasi milisi yang digandrungi anak muda Rusia. Melihat fenomena tersebut baik CSCE/OSCE maupun lembaga HAM seperti *International Helsinki Federation (IHF)* memberi peringatan keras kepada Yeltsin melalui surat resmi untuk menghentikan aktivitas mereka dengan adanya bukti pelanggaran HAM yang dilakukan mereka terhadap warga minoritas, seperti dilaporkan oleh IHF kepada badan resmi penanggulangan etnis di Eropa, yakni ODIHR dan sponsor mereka. Tetapi desakan dan protes peringatan keras itu pun juga tidak diindahkan oleh kalangan birokrat dan polisi Rusia.

Seiring dengan euphoria kemerdekaan dan kebebasan, terdapat

fenomena baru di wilayah Eropa Timur dan Rusia pasca komunis, yakni munculnya etnonasionalisme yang cenderung radikal. Mereka seakan-akan ingin memperlihatkan emosi kebebasan dan keberadaannya dari tekanan yang begitu lama mengekangannya. Sejak Federasi Rusia merdeka, masyarakat Rusia yang mayoritas seakan mendapatkan momentum untuk memperlihatkan kembali identitas kebangsaannya yang besar di antara masyarakat lain, khususnya di negara bagian Rusia. Fenomena tersebut mempengaruhi sebagian remaja Rusia yang sumber daya mereka telah direbut oleh warga minoritas lain, di beberapa kota besar di Rusia. Peristiwa dan fenomena ini juga yang kemudian dimanfaatkan oleh Vladimir Zhirinovsky lewat partainya yang beraliran ultranasionalis. Zhirinovsky mempengaruhi mereka dengan semangat *chauvinisme* radikal yang anti terhadap gagasan multikulturalisme. Sebagian besar pengikutnya adalah kalangan muda dari kelompok masyarakat bawah yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga sangat mudah diprovokasi oleh Zhirinovsky melalui berbagai ajang kampanyenya.

Demokrasi telah menimbulkan kekuatiran pada kaum konservatif dan garis keras karena dianggap dapat membuat ketidakstabilan dan merugikan kepentingan mereka.

Bersama dengan itu, *shock therapy* juga menjadi ancaman untuk mereka. Oleh sebab itu, *shock therapy* ditentang dan dianggap tidak dapat menjamin pekerjaan, meniadakan tabungan, hilangnya jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan yang dulu ditanggung oleh pemerintah Uni Soviet.¹⁰ Dampak dari terapi kejut ini yang kemudian dijadikan bahan untuk menentang kebijakan Presiden Yeltsin oleh kalangan konservatif dan gerakan ultranasionalis.

Pada 17 Desember 1995 diadakan Pemilu Parlementer yang diikuti oleh 43 partai untuk memperebutkan 450 kursi di parlemen. Terpilih kemudian 178 orang yang mewakili 89 wilayah federasi untuk menduduki kursi Majelis Tinggi. Selama kampanye, televisi milik konglomerat menyiarkan kegiatan partai yang didukungnya, yakni yang juga mendukung Boris Yeltsin untuk menjabat Presiden untuk kedua kali. Partai Komunis mendapat 20% suara dan Partai Liberal Demokrat ultranasionalis pimpinan Vladimir Zhirinovskiy mendapat 11% suara. Hampir 1000 orang pemantau internasional ikut terlibat dalam Pemilu di Rusia. Kesimpulan dari para pemantau adalah Pemilu Rusia berjalan lancar

dan sesuai prosedur demokrasi. Walaupun masih terdapat juga kecurangan di beberapa tempat yang terletak jauh di luar propinsi Moskow.¹¹

Kemenangan Boris Yeltsin pada tahun 1996 sebagai Presiden tidak terlalu diharapkan akan menimbulkan perubahan yang berarti. Apalagi dia sulit untuk mendapatkan orang yang dapat dipercaya, termasuk Alexander Lebed, pengusaha dan Gubernur di Krasnoyarsk yang tiga bulan kemudian dipecat olehnya. Kemenangan Yeltsin adalah karena didukung para oligarki korporat yang menyumbangkan dana kampanye sebesar 500 miliar USD, melebihi dana kampanye Presiden AS, Bill Clinton. Kedekatan Yeltsin dengan korporat menimbulkan kekhawatiran pada pihak oposisi, sebab mereka melihat bahwa Yeltsin dipengaruhi oleh para korporat.

Pada Pemilu Presiden putaran pertama bulan Juni 1996, mereka sangat kuatir ketika mengetahui bahwa Partai Komunis dan tokohnya Gennady Zyuganov mendapatkan suara 10% di atas Boris Yeltsin. Sejak awal anggota Duma dari Partai

¹⁰ Alexander Tsipko. "Is Russian Democracy Doomed", *Journal of Democracy*. April. Vo 5 No 2. (Washington: John Hopkins University. 1994), hlm. 21 – 24.

¹¹ Laporan dari Sumber: CSCE: *International Federation for Electoral System: Briefing on Electoral Reforms in Russia, Desember 1994*. Washington DC, *Human Rights in the OSCE Region (Russia) Report 2000 (Events of 1993-1999)*, dalam *Human Rights Watch World Report 1997 – 1998*, <http://www.hrw.org>.

Komunis sering mengkritik dan menolak konsep privatisasi dan liberalisasi ekonomi. Melihat keberadaan para konglomerat terancam karena adanya kenaikan suara dari partai komunis itu, mereka kemudian membantu kampanye Boris Yelstin secara besar-besaran. Tujuannya untuk membentuk opini dan mendudukkan Boris Yeltsin kembali di kursi kepresidenan. Hal itu mereka lakukan dengan mengadakan kampanye besar-besaran di semua media, khususnya media televisi. Pada akhirnya mereka berhasil yang tentunya diikuti juga dengan proses tawar-menawar dalam bentuk resipokral di antara mereka dengan Presiden Boris Yeltsin.¹²

Pada masa transisi, kelompok *status quo* kembali bangkit dan menguasai aset birokrat di propinsi atau di negara bagian yang jauh dari Moskow. Mereka berjuang untuk mendapatkan kedudukan sebagai gubernur, anggota dewan rakyat, anggota parlemen, atau presiden negara bagian. Kondisi itu memberatkan kerja Presiden Yeltsin dalam menjalankan kebijakannya sebab ia sering berbenturan dengan kepentingan mereka. Terpaksa Yeltsin memberhentikan secara tidak hormat beberapa tokoh dari jabatannya.

¹² Sumber: Omri Archive Article, April 1996, <http://archive.tol.cz/omri/restricted/article Php?id=9000-9435>.

Sampai akhir 1998, masih ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap warga minoritas dan pemeluk kepercayaan yang bukan Katolik Ortodoks. Diskriminasi juga dialami oleh orang-orang yang berasal dari Asia Tengah (Kaukasus). Alasannya, mereka dianggap sering menaikkan harga kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini beralasan sebab mereka adalah pemasok yang menguasai pasar dan distribusi bahan pangan yang berasal dari wilayahnya, seperti daging, sayuran, dan buah-buahan.

Masyarakat Rusia yang dominan merasa tersaingi dalam berbagai bidang oleh masyarakat minoritas lainnya, sehingga mereka menekan warga minoritas itu yang dianggap merebut sumber daya mereka. Kondisi keterbukaan telah menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat Rusia terhadap etnis atau bangsa lain. Bentuk kecemburuan sosial yang pada periode Soviet sebelumnya tidak kelihatan, pada masa transisi muncul kepermukaan dengan berbagai tindakan diskriminatif-chauvinis. Kecemburuan sosial ini disebabkan karena masyarakat Rusia kalah bersaing dengan mereka. Kecemburuan sosial ini dimanfaatkan oleh gerakan ultranasionalis sebagai bahan isu mereka dan sekaligus untuk menekan etnis lain yang bukan Rusia.

Sejak 1997, Bank Dunia melaporkan bahwa reformasi ekonomi Rusia

gagal karena sistem perbankan lemah dan usaha deregulasi gagal, serta inflasi melonjak.¹³ Bahkan, diketahui bahwa sebagian bantuan Bank Dunia dan IMF tidak digunakan untuk perbaikan ekonomi, tetapi digunakan untuk membantu kedudukan politik Yeltsin dalam menghadapi pihak Partai Komunis dan gerakan ultranasionalis. Dampak krisis ekonomi itu akhirnya memuncak pada tahun 1998.

Bantuan pihak Barat ke Rusia selain untuk memulihkan perekonomian Rusia juga ingin mengubah citra masyarakat Rusia yang anti Barat. Bantuan itu tidak sepenuhnya berhasil, bahkan menjadi objek kecurigaan golongan garis keras radikal dan konservatif. Mereka menganggap bahwa bantuan itu telah menjerumuskan Rusia sebagai negara pengutang dan menjadi bergantung pada pihak Barat. Sementara itu, bagi kalangan oligarki pro demokrasi, bantuan tersebut menjadi bagian dari akumulasi modal mereka.

Pihak oposisi – di antaranya adalah Partai Komunis Rusia, *Agrarian Party*, Partai Liberal Demokrat (ultranasionalis), dan Partai Federasi Rusia – tidak menyukai kebijakan Boris Yeltsin yang akan membangun Rusia sebagai negara demokratis-

kapitalis. Dibanding dengan negara Eropa Timur lainnya, masa transisi eksekutif di Rusia termasuk yang lama. Di Eropa Timur mereka cepat bereaksi dalam mengimplementasikan konstitusinya, sehingga di pihak eksekutif pun juga terjadi pergantian yang segera.¹⁴

Dalam masa transisi muncul sejumlah fenomena, seperti etnonasionalisme, chauvinisme, liberalisme, dan sekaligus antikapitalisme. Di Rusia semua fenomena tersebut dapat dikatakan muncul bersamaan dalam masa transisi semasa pemerintahan Boris Yeltsin (1991-1999).

Atas dasar itu, seorang oposan berpendapat bahwa Rusia tidak memiliki akar demokrasi. Akibatnya sampai saat ini mereka kesulitan untuk membentuk masyarakat yang demokratis.¹⁵ Bahkan, perwakilan dari gerakan ultranasionalis menegaskan bahwa tidak ada dasar modal masyarakat Rusia yang baik untuk menuju tradisi dan kesadaran demokrasi.¹⁶ Penegasan ini juga merupakan jawaban sekaligus penolakan terhadap aktivitas demokrasi di Rusia.

¹³ *World Bank Report* dalam Anders Aslund 1999 "Russia's Collapse", *Foreign Affairs*, September/Oktober, Vol 78, No 5, 1999, hlm. 70.

¹⁴ Sumber: *OSCE and IHF Report: After 50 Year, Much Work Still Remains on Human Rights in OSCE Regions (Russia)*, <http://www.csce.gov/csce.human.ctm>.

¹⁵ Remnick, 1997. "Can Russia Change?", *Foreign Affairs*, January/February, Vol 76, Number 1. hlm. 42.

¹⁶ McFaul, *Op cit.*, hlm. 12.

Penutup

Transisi demokrasi yang terjadi di Rusia mengalami berbagai kendala untuk berjalan. Walaupun mekanisme pemilu sudah dijalankan, akan tetapi masih banyak terdapat eksesekecurangan dan ketidakadilan. Demokratisasi di Rusia dapat dikatakan masih dalam taraf demokrasi yang terbatas. Dalam arti, secara normatif sudah mempersiapkan sistem aturan demokratis, tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan. Apalagi transisi yang terjadi di Rusia tidak hanya memfokuskan diri pada bidang ekonomi saja, tetapi juga bidang lainnya, seperti konflik etnik, konflik para elit, perwakilan di parlemen, kesempatan berpolitik, kebebasan media massa, rasionalisasi militer, dan batas wilayah. Semua itu menjadi agenda krusial yang menghambat jalannya demokrasi.

Masalah lain yang menghambat adalah bahwa gerakan demokrasi di Rusia masih belum sampai ke akar bawah, seperti adanya gerakan mahasiswa dan organisasi massa yang mengusung ide demokrasi, lamanya rezim komunis berkuasa, dan batas geografi yang luas dan jumlah populasi

penduduk yang beragam. Kemenangan pihak konservatif di putaran pertama Pemilu Presiden tahun 1996 memperlihatkan fenomena belum seimbangnyapopulasi masyarakat antara yang pro demokrasi-moderat dan kelompok masyarakat konservatif yang antidemokrasi.

Berbagai masalah dan krisis yang muncul selama masa transisi demokrasi, secara langsung telah memicu dan mendorong muncul dan berkembangnya gerakan ultranasionalis. Gerakan ini muncul pada tahun 1991 dan berkembang sampai tahun 1996. Setelah Yeltsin memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 1996, gerakan ini melemah. Penyebabnya adalah bahwa kepercayaan masyarakat sudah meningkat terhadap kebijakan pemerintah Yeltsin. Selain itu, walaupun kondisi perekonomian belum stabil, peluang untuk berkembangnya gerakan ultranasionalis melalui media massa telah ditutup, sehingga mereka tidak dapat lagi bersuara dan menyebarkan kritik dan kebencian atas kebijakan pemerintah. Vladimir Zhirinovsky sendiri pun kemudian tersingkir dari panggung politik dan tidak kedengaran lagi tokoh penggantinya. □

REFERENSI

- McFaul, Michael. 2000. "Getting Russian Right", *Foreign Policy*. Winter. No 117, hlm. 65.
- _____. 2000. "Russian Democracy: Still Not a Lost Cause", *The Washington Quarterly*. Winter. Vol 23. No 1..
- Remnick, David. 1997. "Can Russia Change?", *Foreign Affair*. January/February, Vol 76, Number 1.
- Sakwa, Richard. 1994. "Russia, Communism, and Democracy", *Development in Russian and Post-Soviet Politics* (White, Stephen, et al). London: McMillan.
- Sharlet, Robert. 1994. "Citizen and State Under Gorbachev and Yeltsin", *Developments in Russian and Post-Soviet Politics*. (White, Stephen, et al). London: McMillan
- Stein, Angela E. 2002, "Russia: Farewell to Empire?", *World Policy Journal*, Fall. Vol XIX, No 3. hlm. 83.
- Triesman, Daniel. 2000 "After Yeltsin Come Yeltsin", *Foreign Policy*. Winter, No 117.
- _____. 2000 "Blaming Russia First: Review Essay: Three Books Examine Russia's Woes", *Foreign Affair*. November/December, 146.
- Tsipko, Alexander. 1994. "Is Russian Democracy Doomed", *Journal of Democracy*. April. Vol. 5 No 2. (Washington: John Hopskin University.), hlm. 21 – 24.
- Willerton, John P. 1994. "Yeltsin and Russian Presidency", *Developments in Russian and Post-Soviet Politics*. (White, Stephen, et al). London: McMillan.
- White, Stephen, Alex Pravda, dan Zvi Gitelman (eds). 1994. *Development in Russian and Post-Soviet Politics*. London: McMillan.
- World Bank Report* dalam Anders Aslund 1999 "Russia's Collapse", *Foreign Affair*. September/Oktobre, Vol 78, No 5, hlm. 70.

Sumber Internet

OSCE and IHF Report: After 50 Year, Much Work Still Remains on Human Rights in

OSCE Regions (Russia), <http://www.csce.gov/csce.human.ctm>.

Omri Archive Article, April 1996, <http://archive.tol.cz/omri/restricted/articlePhp3?id=9000-9435>.

Laporan dari Sumber: CSCE: *International Federation for Electoral System: Briefing on Electoral Reforms in Russia, Desember 1994*. Washington DC, *Human Rights in the OSCE Region (Russia) Report 2000 (Events of 1993-1999)*, dalam *Human Rights Watch World Report 1997 – 1998*, <http://www.ihf-hr.org>.

Russian Political Landscape 1991 – 1996, Political Dynamics in Russia 1991 – 1996, and GNP Russian Federation, http://www.nupi.no/russland/election/russian_political_landscape_1991.htm, Cox, *Op cit.*, hlm. 32.

Surat Kabar *Segodnya*, dalam Omri Archive Article, 21 Juni 1992, <http://archive.tol.cz/omri/restricted/articlePhp3?id=9000-9120>.

Post-Soviet Media Law & Policy Newsletter 1993 – 2000, Moskow Media Law and Policy Center. <http://www.vii/monroe>.